

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nugroho, Sigit Sapto. Haryani, Anik Tri & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*.

Sukoharjo; Oasepustaka.

Mulyawan, Rahman. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung;UnpadPress

Sahir, Syafrida Hanif. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:KBMIndonesia

Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya:

Bayumedia.

Thahir, Baharuddin. (2019). *PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH INDONESIA;*

SEBUAH BUNGA RAMPAL. Penulisan Buku Literatur IPDN

Purba, Elvis F & Simanjuntak, Parulian (2012). *METODE PENELITIAN*. Medan;

Laritmas, Selfianus. & Rosidi, Ahmad (2024). *Teori-Teori Negara Hukum*.

Kencana;Jakarta

Adnan, Indra Muchlis. (2019). *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI:DINAMIKA*

NEGARA HUKUM DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI

INDONESIA. Trussmedia Grafika:Yogyakarta

Sumali. (2002). *Reduksi kekuasaan Eksekutif Dibidang Peraturang Pengganti*

Undang-Undang. UMM Press:Malang

Hanta Yuda (2010) *Presidensialisme Setengah Hati*, PT. Gramedia pustaka Utama

Zainal Arifin Hoesein (2016) *Kekuasaan Kehakiman di Indoenesia*. Jatim: Setara Press

Kelompok Instrans Publishing.

Franz Magnis Susesno (2001) *Mencari Sososk Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*.

Jakarta : Raja Rajawali Pers

Subekti, Valina Singka. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia; Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta

Fatihah, Aulina Nissa. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monokrasi*.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung:

Bandung

Sholahuddin, Abdul Hakam. (2023). *HUKUM PEMILU DI INDONESIA*. Sada Kurnia

Perkasa: Banten

Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

Satya Arinanto(2009) *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Tim Penyusun

Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif. Jakarta:

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2010, hlm. 326.

Surbakti, Ramlan. Supriyanto, Didik. & Paramastuti, Nindita. (2011). *Penanganan*

Pelanggaran Pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta

Yanto, Oksidelfa. (2020). *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN*

KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia).
Pustaka Reka Cipta: Bandung

Arifin, Firdaus. (2019). *Ilmu Negara Kontemporer; Perkembangan Konsep, Teori, dan*

Doktrin. Thafa Media.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

B. Sumber lain

Safaat, Ali. (2016). Sistem Pemerintahan Negara. *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.*

Santosa, E & Aisyah, Siti. (N D). Dasar-Dasar Sistem Pemerintahan.

IPEM4320/MODUL 1.

Syudaha, Otong. (2021). KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA

YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA. *Presumptionoflaw: Volume 3*

Nomor 1

Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 294–308.
<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.481>

Noviantika, Tria & Taufiq, M Shofwan. (2021). EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA *Muhammadiyah Law Review* 5 (1), Januari 2021.

Rahmani, Deden Ilham. (2023). TANTANGAN DAN HARMONI ANTARA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA. *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara* Volume 2 No. 1 Oktober 2023

Anangkota, Muliadi (2017). KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN PERSPEKTIF PEMERINTAHAN MODERN KEKINIAN. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Huda, Ni'matul (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 28 SEPTEMBER 2021: 550 - 571

Yaniawati, R Poppy. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).

Diakses dari

<https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>

Santoso, Hari Agus. (2021). PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU “PTB”. *Jatiswara. Vol. 36 No. 3 November 2021*

Universitas Negeri Makassar. (N D). Analisis Data Kualitatif. Diakses dari https://lms.syamok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf

Ardhianthi, Ni Made Uttari Ivani. (2023). ANALISA TENTANG KONSEP DAN TEORI NEGARA HUKUM DI INDONESIA. *Vidya Wertta Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023*

Mahkamah Konstitusi. (2016). MODUL PENDIDIKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*

Roziqin & Sofyhan, Ibnu. (2023). Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure: Volume 15 Nomor 1*

Tombeng, Joysua Eben. Mawuntu, Ronald. & Mamahit, Cobi E.(2021).

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. *Lex Administratum, Vol. IX/No.*
3/Apr/2021

Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal. (2019). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT,
MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU. *NUSANTARA :*
Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial - Vol. 6 No 1 (2019)

Samuel P. Huntington. (N D). Third Wave: Democratization in The Late Twentieth
Century. Kristina, Jurnal Dinamika (Jurnal, Fakultas Ilmu sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005)

Adil, Marsela Marissaha. (2020). TINJAUAN YURIDIS
MENGENAI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA. *Lex Administratum, Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020*

Pangestu, Aji. (2022). UPAYA MEMINIMALISIR POTENSI PELANGGARAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK
2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 1, Juni 2022*

Nasir, Iqbal. (2020). ANALISIS HUKUM PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU/PEMILIHAN. *Khazanah Hukum, Vol. 2No. 1: 41-50*

Saputra, Asbudi Dwi. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu
bagi Penyelenggara Pemilu. *Pleno Jure, Vol 9 (2)*

Afif, Zaid. (2018). KONSEP NEGARA HUKUM RULE OF LAW DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Pionir LPPM*

Universitas Asahan Vol. 2 N0.5 Juli-Desember 2018

Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2020). POLITIK HUKUM PADA PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMILU. *Khazanah Hukum, Vol. 2No. 2: 24-31*

Anshar, Sayid. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.

SOUMATERA

LAW

REVIEW

(<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) *Volume 2, Nomor 2, 2019*

Hendra Sudrajat, Beggy Tamara. (2018) .Peran Naskah Akademik Dan Daftar

Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. ||
Soumatera Law Review 1(2).

Muhlasin, Ias. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di

Indonesia. *Jurnal Al-Qad Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021*

Ramdani, Dedi. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum

Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat Volume 3
Nomor 1*

Ismail & Hidayat. (2023). PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Dharmawangsa
Volume 17, Nomor 1:331-341*

Anwar, Akhmad Hairil. (2019). Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan

Pemilu. *Jurnal Hukum dan Keadilan. Volume 3, Nomor 2, September 2019*

Bidja, Isnanto. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu

Demokratis Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022*

Pratiwi, Sulistya. (2023). Daftar Menteri dan Wamen dalam Timses Capres-Cawapres pada Pemilu 2024 diakses dari <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-menteri-dan-wamen-dalam-timses-caprescawapres-pada-pemilu-2024>.

Chusna, Fitria & Meliana, Diamanty. (2018). Menteri Boleh Jadi Tim Kampanye dengan Syarat Berikut. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/21/16420461/menteri-boleh-jadi-tim-kampanye-dengan-syarat-berikut>.

Munawaroh, Nafiatul (2023). 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-1t5bc40aaec6160/>

Santi Dewi. (2023). Kemhan Buka Suara soal Viral Prabowo Naik Heli untuk Kampanye. Diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/kemhan-buka-suara-soal-viral-prabowo-naik-heli-untuk-kampanye>

CnnIndonesia. (2024). Tagar Prabowo-Gibran di Akun X Kemhan Dilaporkan ke Bawaslu RI Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123181554-617-1053404/tagar-prabowo-gibran-di-akun-x-kemhan-dilaporkan-ke-bawaslu-ri>.

Dandhy Dwi Laksono. (2024). Dirty Vote. Diakses dari

<https://www.youtube.com/watch?v=RRgLZ66NCmE&t=2661s>

BBC. (2023). Zulkifli Hasan dituduh melecehkan gerakan salat - 'Kenapa politisasi

agama disebut pendidikan buruk bagi publik?' Diakses dari

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgwx84pwjzo>

Antara. Sedayu, Agung. (2024). Kampanye untuk Prabowo-Gibran, Erick Thohir

Tidak Berencana Mundur Sebagai Menteri BUMN. Diakses dari

[https://bisnis.tempo.co/read/1828763/kampanye-untuk-prabowo-gibran-](https://bisnis.tempo.co/read/1828763/kampanye-untuk-prabowo-gibran-erick-thohir-tidak-berencana-mundur-sebagai-menteri-bumn)

[erick-thohir-tidak-berencana-mundur-sebagai-menteri-bumn.](https://bisnis.tempo.co/read/1828763/kampanye-untuk-prabowo-gibran-erick-thohir-tidak-berencana-mundur-sebagai-menteri-bumn)

Munawaroh, Nafiatul (2024). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para

Ahli diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/)

[filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>](https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/)

Hukumonline. (2023). Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu diakses dari

[https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/)

Bawaslu NTB. (N D). ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN.

Diakses dari <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/#:~:text=Pelanggaran%20Pemilu%20adalah%20tindakan%20yang,Pelanggaran%20administrasi>

Munawaroh, Nafiatul (2023). 9 Jenis Tindak Pidana Pemilu. Diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>

Aryandani, Renie. (2024). Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana

Pemilu, dan Sengketa Pemilu.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pelanggaran-administratif-pemilu-pidana-pemilu-dan-sengketa-pemilu-lt65b248d363d2e/>

